

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance

Wati Tri Utami¹⁾, Erma Setiawati²⁾

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200210415@student.ums.ac.id¹⁾, es143@ums.ac.id^{2)*}

*Corresponding author

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Environmental Uncertainty, Debt Policy, Firm Size, Ownership Structure, and Political Connections on Tax Avoidance in manufacturing companies within the Property & Real Estate subsector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from financial reports. The sample was selected using a purposive sampling method based on specific criteria. The dependent variable, Tax Avoidance, is measured using the Effective Tax Rate (ETR), while the independent variables include Environmental Uncertainty, Debt Policy, Firm Size, Ownership Structure, and Political Connections. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS, including descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results indicate that only Ownership Structure significantly influences Tax Avoidance, while other variables do not show a significant effect. The limitations of this study include a narrow subsector focus, the exclusion of other potential determinants of tax avoidance, and the limited research period from 2019 to 2023. Future research is recommended to expand sector coverage, incorporate additional variables, and extend the research period to enhance the comprehensiveness of the findings.

Keywords: Debt Policy, Environmental Uncertainty, Ownership Structure, Political Connections, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sementara variabel independen terdiri dari Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Koneksi Politik. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS, meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Struktur Kepemilikan yang berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sementara variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan sub sektor yang terbatas, variabel penelitian yang belum mencakup seluruh determinan *tax avoidance*, serta periode penelitian yang hanya mencakup tahun 2019-2023. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan

sektor, menambah variabel penelitian, dan memperpanjang periode analisis agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Kata kunci: Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, *Tax Avoidance*.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari individu maupun entitas bisnis kepada negara yang bersifat memaksa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembangunan, namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai pengurang laba bersih, sehingga muncul berbagai strategi untuk meminimalisirnya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah *tax avoidance*, yaitu praktik legal dalam perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan (Yuniarti et al., 2020). Meskipun tidak melanggar hukum, *tax avoidance* dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dalam jumlah signifikan (Falbo & Firmansyah, 2021). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun akibat praktik ini (Herdona, 2021). Salah satu contoh konkret adalah kasus PT Extel Communication, di mana direktur perusahaan dijatuhi hukuman penjara akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak selama tiga tahun berturut-turut (Wildan, 2021).

Faktor utama yang memengaruhi *tax avoidance* dapat dikategorikan dalam aspek internal dan eksternal perusahaan. Secara eksternal, ketidakpastian lingkungan mendorong manajemen untuk mengadopsi strategi agresif dalam perpajakan, terutama saat menghadapi perubahan regulasi, ketidakstabilan pasar, atau persaingan bisnis yang ketat (Carolina & Purwantini, 2020). Ketika kondisi ekonomi tidak menentu, manajemen perusahaan cenderung memilih pelaporan keuangan yang lebih konservatif guna mempertahankan kepercayaan investor, tetapi dalam kondisi stabil, strategi penghindaran pajak cenderung meningkat (Seviana & Kristanto, 2020). Selain itu, kebijakan pendanaan perusahaan juga memengaruhi tingkat *tax avoidance*, di mana perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi beban pajak melalui skema pembayaran bunga pinjaman (Dewi & Noviani, 2017).

Di sisi internal, ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan besar dengan aset yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Selain itu, struktur kepemilikan juga berperan dalam menentukan kebijakan pajak. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi insentif untuk menghindari pajak karena keputusan yang diambil berdampak langsung terhadap kepentingan mereka sebagai pemilik (Charisma & Dwimulyani, 2019). Namun, ketika kepemilikan saham oleh manajemen kecil, mereka cenderung lebih fokus pada peningkatan laba tanpa memperhatikan risiko yang ditanggung perusahaan secara keseluruhan.

Selanjutnya, koneksi politik menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan perpajakan. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan aktor politik sering kali mendapatkan keuntungan seperti kemudahan akses pendanaan atau pengawasan pajak yang lebih longgar (Swingly & Sukartha, 2015). Hal ini dapat mengurangi transparansi laporan keuangan dan meningkatkan potensi manipulasi pajak demi kepentingan perusahaan. Studi sebelumnya telah meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, namun penelitian ini mengembangkan kajian lebih lanjut dengan menambahkan variabel baru, yaitu ketidakpastian lingkungan, struktur kepemilikan, dan koneksi politik, serta fokus pada perusahaan manufaktur sub-sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

TINJAUAN LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana konflik muncul akibat perbedaan preferensi risiko di antara keduanya (Jensen & Meckling, 1976; Solikin & Slamet, 2022). Manajemen sering kali mengambil keputusan yang lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri, bukan bagi pemegang saham, terutama karena adanya asimetri informasi yang membatasi akses pemilik terhadap data perusahaan (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Dalam konteks penghindaran pajak, konflik ini memperbesar potensi manajemen untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih, yang dapat menciptakan ilusi kinerja keuangan yang baik, meskipun strategi tersebut tidak selalu menguntungkan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak mengacu pada strategi legal dalam mengurangi beban pajak perusahaan melalui perencanaan perpajakan yang sistematis (Nurmawan & Nuritomo, 2022; Puspitasari et al., 2022). Meskipun tidak melanggar hukum, tindakan ini bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Perusahaan besar sering kali menggunakan skema akuntansi yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang menyebabkan ketidakadilan karena perusahaan kecil tidak memiliki fleksibilitas yang sama (Krisna, 2019). Akibatnya, ketidakadilan ini dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merujuk pada kondisi di mana manajemen sulit memperkirakan kondisi masa depan yang dapat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran perusahaan (Yu et al., 2016). Ketidakpastian ini menjadi tantangan bagi manajemen puncak dalam menyusun strategi yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan (Huang et al., 2017). Dalam kondisi penuh ketidakpastian, perusahaan cenderung mengadopsi strategi efisiensi biaya, termasuk dalam aspek perpajakan, di mana penghindaran pajak dapat menjadi langkah untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan menarik kepercayaan investor.

Kebijakan Utang

Leverage atau kebijakan pendanaan melalui utang sering kali dikaitkan dengan penghindaran pajak, mengingat biaya bunga utang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Perusahaan yang menggunakan pembiayaan berbasis utang cenderung melaporkan laba sebelum pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih bergantung pada pendanaan ekuitas. Dengan demikian, kebijakan *leverage* dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi kewajiban pajak dan mengoptimalkan struktur modal perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dikategorikan berdasarkan total aset, nilai pasar saham, atau tingkat penjualan tahunan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan direpresentasikan melalui log total aset karena dianggap lebih stabil dibandingkan proksi lainnya dan memiliki kesinambungan antarperiode (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk melakukan strategi penghindaran pajak dibandingkan perusahaan kecil karena memiliki sumber daya lebih besar untuk mengakses metode perencanaan pajak yang lebih kompleks.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan saham oleh manajemen cenderung menekan praktik penghindaran pajak karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kepentingan mereka sebagai pemilik. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan entitas secara keseluruhan.

Koneksi Politik

Koneksi politik mencerminkan hubungan antara perusahaan dan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh di bidang politik, yang dapat memberikan berbagai keuntungan, termasuk akses lebih mudah terhadap pendanaan dan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan (Manihuruk & Novita, 2022). Perusahaan dengan koneksi politik umumnya memiliki pengawasan pajak yang lebih longgar, memungkinkan mereka lebih leluasa dalam perencanaan pajak dan berpotensi mengurangi transparansi laporan keuangan (Avanda, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan risiko ketidaktransparanan dalam pelaporan keuangan.

Pengembangan Hipotesis.

Ketidakpastian Lingkungan terhadap *Tax Avoidance*

Ketidakpastian lingkungan menciptakan peluang bagi manajemen untuk mengurangi beban operasional, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* guna menjaga kestabilan arus kas perusahaan. Stabilitas ini penting bagi investor dalam mempertahankan investasinya di perusahaan. Menurut teori agensi, perbedaan kepentingan antara agen (manajemen) dan principal (pemilik) mendorong agen

untuk mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. *Tax avoidance* dapat meningkatkan laba setelah pajak karena pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga laba yang lebih tinggi dapat menarik perhatian investor. Hasil penelitian (Kusuma Putri & Syafruddin, 2021; R. Sari, 2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan mempengaruhi *tax avoidance*, sementara studi lain (Carolina & Purwantini, 2020) menemukan bahwa faktor ini tidak memiliki dampak signifikan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kebijakan Utang terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan utang atau *leverage* merujuk pada penggunaan sumber pendanaan dengan beban tetap, seperti utang atau saham preferen, dalam struktur modal perusahaan (Weston, 1990; Riyanto, 1996). Berdasarkan teori keagenan, tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi meningkatkan *tax avoidance* karena beban bunga utang dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Beberapa penelitian (Puspitasari et al., 2022; Harianto, 2020; Purnamasari & Yuniarwati, 2024) mendukung bahwa *leverage* memengaruhi *tax avoidance*, sementara penelitian lain (Ngadiman & Puspitasari, 2017) menemukan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₂: Kebijakan utang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset, nilai penjualan, jumlah karyawan, atau ekuitas perusahaan (Riyanto, 2008). Perusahaan dengan skala besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola pajak dan melakukan *tax avoidance* guna mengoptimalkan efisiensi pajak. Beberapa penelitian (Ngadiman & Puspitasari, 2017; Apriliani & Wulandari, 2023; Purnamasari & Yuniarwati, 2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan utang tidak memiliki hubungan langsung dengan *tax avoidance*. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*

Struktur kepemilikan saham suatu perusahaan berperan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh manajemen (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan institusional dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Struktur kepemilikan yang kuat, khususnya kepemilikan oleh manajer, dapat menekan tindakan *tax avoidance* karena adanya insentif untuk menjaga reputasi perusahaan. Penelitian (Apriliani & Wulandari, 2023; Carolina & Purwantini, 2020) menunjukkan adanya pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*, tetapi studi lain (Rozan et al., 2023) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi politik dalam suatu perusahaan terjadi ketika pemegang saham utama, dewan direksi, atau komisaris memiliki hubungan dengan aktor politik, baik melalui jabatan sebelumnya di pemerintahan maupun kedekatan dengan partai politik (Munawaro & Ramdany, 2020). Perusahaan dengan koneksi politik sering kali mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, yang dapat menciptakan celah dalam kepatuhan pajak. Koneksi politik juga dapat melemahkan efektivitas penegakan regulasi perpajakan. Penelitian (April et al., 2017) menunjukkan bahwa koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*, sedangkan studi lain (Carolina & Purwantini, 2020) menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H₅: Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sub-sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan tahunan dan kondisi keuangan perusahaan. Variabel yang diteliti mencakup penghindaran pajak sebagai variabel dependen, serta ketidakpastian lingkungan, kebijakan utang, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan koneksi politik sebagai variabel independen. Penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel lain menggunakan metode perhitungan yang sesuai, termasuk rasio keuangan dan variabel *dummy* untuk koneksi politik. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS, mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta pengujian hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Tujuan penelitian ini adalah menilai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak guna memberikan wawasan bagi kebijakan perpajakan dan strategi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek dan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, di mana analisis data dilakukan secara statistik dengan representasi numerik. Fokus utama penelitian ini adalah menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan, kebijakan utang, skala perusahaan, struktur kepemilikan, serta afiliasi politik terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni mengumpulkan informasi dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di situs resmi <http://www.idx.co.id/> maupun laman resmi masing-masing entitas. Subjek penelitian mencakup perusahaan sektor properti & real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* guna memastikan data yang diperoleh lebih representatif.

Dari kriteria yang telah ditetapkan, jumlah sampel yang diambil setiap tahun sebanyak 14 perusahaan, menghasilkan total 70 data observasi sebelum dilakukan eliminasi data outlier, yang kemudian menyisakan 65 data yang layak digunakan dalam analisis:

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel dengan Purposive Sampling

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023	92
2	Perusahaan manufaktur sub sektor Properties & Real Estate yang tidak mempublikasikan annual report untuk periode 2019- 2023	(26)
3	Perusahaan yang mengalami rugi sebelum pajak berturut turut selama periode 2019- 2023	(38)
4	Perusahaan yang tidak tersedia datanya secara lengkap berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian	(14)
	Sampel penelitian	14
	Tahun penelitian	5
	Jumlah Sampel	70
	Outlier	(5)
	Total unit analisis selama lima tahun yang diolah	65

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Outlier merupakan data yang memiliki karakteristik tidak lazim dan secara signifikan menyimpang dari observasi lainnya, ditandai dengan nilai ekstrem baik pada variabel tunggal maupun kombinasi variabel (Ghozali, 2021). Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, dengan sampel terdiri dari perusahaan sektor properti dan real estat yang dipilih melalui metode purposive sampling. Dari total 70 observasi yang diperoleh dari 14 perusahaan, dilakukan identifikasi dan eliminasi 5 data outlier, sehingga jumlah data akhir yang dianalisis berkurang menjadi 65.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketidakpastian lingkungan	65	0,01	0,12	0,0385	0,02653
Kebijakan Utang	65	0,05	1,81	0,6474	0,46529
Ukuran Perusahaan	65	23,99	31,42	29,0686	2,09725
Struktur Kepemilikan	65	0,23	0,97	0,6382	0,21834
Koneksi Politik	65	0,00	1,00	0,4154	0,49662
Tax Avoidance	65	0,00	0,19	0,0305	0,03850
Valid N (Listwise)	65				

Sumber: Data Diolah SPSS 25

Hasil analisis deskriptif yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan jumlah sampel (N) 65 data Perusahaan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dari setiap variabel diinterpretasikan sebagai berikut:

Ketidakpastian lingkungan memperoleh nilai rata rata sebesar 0,0385 Nilai *maksimum* 0,12 diperoleh PT(BAPA) pada tahun 2021 Sedangkan nilai *minimum* 0,01 diperoleh oleh PT (JPRT) pada tahun 2019 dan 2023 Ketidakpastian lingkungan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,02653.

Kebijakan utang memperoleh nilai rata rata sebesar 0,6474. Nilai maksimum 1,81 diperoleh oleh PT (APLN) pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum 0,05 diperoleh oleh PT (BAPA) pada tahun 2021 dan 2022. Kebijakan utang memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,46529.

Ukuran Perusahaan memperoleh nilai rata rata sebesar 29,0686. Nilai maksimum 31,42 diperoleh oleh PT (CTRA) pada tahun 2023. Sedangkan nilai minimum 23,99 diperoleh oleh PT (PWON) pada tahun 2019. Ukuran Perusahaan memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,09725.

Struktur Kepemilikan memperoleh nilai rata rata sebesar 0,6382. Nilai maksimum 0,97 diperoleh oleh PT (SMDM) pada tahun 2019 dan 2022. Sedangkan nilai minimum 0,23 diperoleh oleh PT (BCIP) pada tahun 2019. struktur Kepemilikan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,21834.

Koneksi Politik memperoleh nilai rata rata 0,4154. dalam variabel ini menggunakan dummy yang Nilainya hanya 1 dan 0 maka nilai maksimum 1,00 dan Nilai minimum 0,00. Koneksi Politik memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,49662.

Tax avoidance memperoleh nilai rata rata 0,0305. Nilai maksimum 0,19 diperoleh oleh PT (KIJA) pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum 0,00 diperoleh oleh PT (DUTI) pada tahun 2020 dan 2022. *Tax Avoidance* memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,3850.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan CLT (*Central Limit Theorem*). Jumlah data yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 65, yang artinya $65 > 30$ menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi dengan normal. Sehingga model regresi dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ketidakpastian Lingkungan (KL)	0,784	1,275	Tidak terjadi multikolinearitas
Kebijakan Utang (KU)	0,510	1,960	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (UP)	0,549	1,820	Tidak terjadi multikolinearitas
Struktur Kepemilikan (SK)	0,591	1,692	Tidak terjadi multikolinearitas
Koneksi Politik (KP)	0,696	1,437	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa secara berturut-turut variabel ketidakpastian lingkungan (KL), kebijakan utang (KU), ukuran Perusahaan (UP), struktur kepemilikan (SK), koneksi politik (KP) mempunyai nilai *tolerance* 0,784; 0,510; 0,549; 0,591; 0,696 yang kesemuanya >0,10 serta nilai VIF sebesar 1,275; 1,960; 1,820; 1,692; 1,437 yang kesemuanya <10. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebas (independen) tidak terjadi adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Ketidakpastian lingkungan	0,806	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kebijakan utang	0,575	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan	0,521	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Struktur kepemilikan	0,154	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Koneksi politik	0,664	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas (independen) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu ketidakpastian lingkungan sebesar 0,806; kebijakan utang sebesar 0,575; ukuran Perusahaan sebesar 0,521; struktur kepemilikan sebesar 0,154; koneksi politik sebesar 0,664. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Unstandardized Residual	1,202	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data Diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji diatas, disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,202 yang artinya terletak antara -2 sampai +2 sehingga dapat ditarik kesimpulan jika tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Regresi linier Berganda

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	T	Signifikansi	Keterangan
Konstanta	-0,001	-0,011	0,991	
Ketidakpastian Lingkungan	0,103	0,544	0,589	H1 Ditolak
Kebijakan Utang	0,016	1,167	0,248	H2 Ditolak

Ukuran Perusahaan	0,002	0,634	0,528	H3 Ditolak
Struktur Kepemilikan	-0,058	-2,198	0,032	H4 Diterima
Koneksin Politik	0,004	0,385	0,720	H5 Ditolak
Adjusted R Square		0,147		
F		3,208		
Signifikansi		0,013		

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dibuat persamaan regresi yang akan melengkapi hasil yang ditemukan dalam penelitian sebagai berikut :

$$TA = -0.001 + 0.103 KL + 0.016 KU + 0.002 UP - 0.058 SK + 0.004 KP + e$$

Berdasarkan model persamaan regresi berganda di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai Konstanta (α) = -0.001 berarti apabila variabel independen bernilai 0 maka besarnya variabel dependen sebesar 0,001. Nilai koefisien ketidakpastian lingkungan (KL) sebesar 0,103 ini berarti jika terjadi peningkatan ketidakpastian lingkungan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* akan meningkat sebesar 10,3% begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan 1% maka nilai *tax avoidance* juga mengalami penurunan sebesar 10,3%. Nilai koefisien kebijakan utang (KU) sebesar 0.016 ini berarti jika terjadi peningkatan kebijakan utang sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* akan meningkat sebesar 1,6% begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan 1% maka nilai *tax avoidance* juga mengalami penurunan sebesar 1,6%. Nilai koefisien ukuran Perusahaan (UP) sebesar 0,002 ini berarti jika terjadi peningkatan ukuran Perusahaan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,2% begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan 1% maka nilai *tax avoidance* juga mengalami penurunan sebesar 0,2%. Nilai koefisien struktur kepemilikan (SK) sebesar - 0,058 ini berarti jika terjadi peningkatan struktur kepemilikan sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* akan menurun sebesar 5,8%. Nilai koefisien koneksi politik (KP) sebesar 0,004 ini berarti jika terjadi peningkatan koneksi politik sebesar 1%, maka nilai *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0,4% begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan 1% maka nilai *tax avoidance* juga mengalami penurunan sebesar 0,4%. merupakan error term, yang menjelaskan bahwa terdapat adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Berdasarkan hasil tabel 6 dapat dilihat bahwa pada Nilai Sig. F sebesar 0,013 (<0,05) Hal ini berarti bahwa variabel ketidakpastian lingkungan, kebijakan utang, ukuran Perusahaan, struktur kepemilikan, koneksi politik secara simultan mempengaruhi variabel *tax avoidance*. Dengan kata lain, model penelitian layak (*fit*).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,147 yang menunjukkan bahwa 14,7%. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan (KL), kebijakan utang (KU), ukuran perusahaan (UP), struktur kepemilikan (SK), koneksi politik (KP) secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) sebesar 14,7% sedangkan sisanya 85,3% (100%- 14,7%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi.

Hasil Uji T

Berdasarkan Uji t pada Tabel 6, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan memiliki tingkat signifikansi 0,589 ($>0,05$), sehingga H1 ditolak, menandakan bahwa faktor ini tidak berkontribusi terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, kebijakan utang juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,248 ($>0,05$), sehingga H2 ditolak. Demikian pula, ukuran perusahaan yang memiliki nilai signifikansi 0,528 ($>0,05$) tidak berdampak pada *tax avoidance*, menyebabkan H3 ditolak. Berbeda dengan variabel lain, struktur kepemilikan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,032 ($<0,05$), sehingga H4 diterima. Sementara itu, koneksi politik yang memiliki nilai signifikansi 0,702 ($>0,05$) tidak berkontribusi terhadap *tax avoidance*, menyebabkan H5 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap *Tax avoidance*

Variabel ketidakpastian lingkungan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.589 > 0.05$, maka H1 ditolak yang artinya ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketidakpastian lingkungan harus diperlakukan dengan ketelitian. sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan target yang diinginkan oleh Perusahaan dan bisa meningkatkan kinerja Perusahaan dimasa yang akan datang. dalam seorang manajer memiliki peran yang adil dalam melindungi nama baik perusahaan terhadap *stakeholder*. dalam pengambilan Keputusan manajer sangat berpengaruh terhadap Perusahaan sehingga seorang manajer memutuskan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*, maka tidak mempengaruhi kondisi Perusahaan yang sedang mengalami ketidakpastian lingkungan maupun Perusahaan yang kondisi lingkungan yang baik saja. Penyebabnya rata- rata Perusahaan masih belum bisa untuk menetapkan pola strategi bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga mengakibatkan adanya tidak konsisten dalam penerapan strategi, maka dalam memperoleh keuntungan dan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan tidak didasarkan dengan strategi yang dipakai. Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak didasari dengan strategi yang dipakai di perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Carolina & Purwantini, 2020); (Huang et al., 2017) dan (Mawaddah & Darsono, 2022)

Pengaruh Kebijakan Utang terhadap *Tax Avoidance*

Variabel kebijakan utang mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.248 > 0.05$, maka H2 ditolak yang artinya kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan utang yang semakin tinggi maka semakin tinggi jumlah dari pendanaan yang diperoleh dari utang bisa dipergunakan oleh Perusahaan, Dimana pendanaan tersebut berasal dari pihak ketiga yang membuat tingginya bunga dari hutang tersebut. Bunga yang meningkat bisa meminimalisir beban pajak Perusahaan yang akan dibayarkan. Dengan berkurangnya beban pajak yang Perusahaan yang akan dibayarkan, Perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) supaya bisa meminimalkan beban pajak Perusahaan dikarenakan pajak yang akan dibayarkan sudah rendah. Maka semakin meningkatnya kebijakan utang maka semakin menurunnya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis tetapi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (A. Y. Sari et al., 2021) (Ngadiman & Puspitasari, 2017) dan (Indra Maulana, 2020).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel ukuran Perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.528 > 0.05$, maka H3 ditolak yang artinya ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa bahwa besar kecilnya Perusahaan tidak mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Perusahaan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban dalam perpajakan. Selain itu, entitas yang besar kemungkinan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan publik, sehingga entitas besar cenderung berusaha untuk menjaga citra entitas dan cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Entitas besar cenderung patuh pada peraturan terkait perpajakan serta lebih hati-hati untuk pengambilan kebijakan/keputusan terkait perpajakan. Hal ini dikarenakan jika entitas tidak melakukannya, maka dapat merugikan entitas, seperti sanksi, dan menciptakan reputasi yang buruk bagi entitas di mata masyarakat dan pemerintah. (Puspitasari et al., 2022); Dewi & Noviani (2017); Putri & Yuliafitri (2024); (Pravitasari & Khoirawati, 2022).

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel struktur kepemilikan mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.032 < 0.05$, maka H4 diterima yang artinya secara parsial struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan institusional di dalam Perusahaan memiliki hubungan yang erat terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak kepemilikan institusional maka Tingkat pengawasan juga semakin ketat. Semakin banyak kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Bahwa institusional penting memainkan dalam pemilik peran memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku

mementingkan diri sendiri tetapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penulisan dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jasmine, 2017); (Harianto (2020) (Ngadiman & Puspitasari (2017) dan (Carolina & Purwanti (2020).

Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Variabel koneksi politik mempunyai nilai signifikansi sebesar $0.702 > 0.05$, maka H5 ditolak yang artinya koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi koneksi politik tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena Perusahaan tidak ada aturan dalam undang-undang perpajakan yang mengatur tentang tarif perpajakan yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam hubungan politik dalam Perusahaan dengan pemerintah. Hal ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk menghindari praktik penghindaran pajak. Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Sehingga, perusahaan akan lebih mengutamakan manfaat jangka panjang dibandingkan keuntungan yang hanya dapat dinikmati sesaat demi keberlangsungan usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Carolina & Purwantini, 2020) (April et al.(2017) (Apriliani & Wulandari (2023) dan (Sawitri et al. (2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mengenai pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, serta Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, diperoleh kesimpulan bahwa hanya Struktur Kepemilikan yang memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak (H4 diterima), sedangkan Ketidakpastian Lingkungan, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik tidak berpengaruh (H1, H2, H3, dan H5 ditolak). Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya hanya berfokus pada subsektor tertentu yang kurang merepresentasikan dinamika industri secara luas, penggunaan variabel independen yang terbatas sehingga belum menggambarkan seluruh determinan *tax avoidance*, serta cakupan periode penelitian yang hanya meliputi tahun 2019-2023 sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk periode lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor agar lebih mampu menangkap variasi kondisi internal dan eksternal perusahaan, menambahkan variabel yang lebih komprehensif guna meningkatkan pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, serta memperpanjang rentang waktu penelitian agar memperoleh hasil yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- April, P., Akuntansi, J. R., Ferdiawan, Y., Firmansyah, A., Keuangan, P., & Stan, N. (2017). *Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan* merupakan. 5(3), 1601-1624.
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Arsanti, P. M. D., & Fauzan, I. N. F. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance (empirical study of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/16126>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 154-173.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1-10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4308>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882-911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dwi Laksono, D. G., & Firmansyah, A. (2020). the Role of Managerial Ability in Indonesia: Investment Opportunity Sets, Environmental Uncertainty, Tax Avoidance. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 1305-1318. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84123>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Multinationality Dan Manajemen Laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94-110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Farah Dinah, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan penerbit universitas Diponegoro.

- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Liability*, 02(1), 49–69.
- Harianto, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Utang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*. <https://ojs.uph.edu/index.php/KIA9/article/view/5577>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. *Advances in Taxation*, 24, 83–124. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Indra Maulana, R. P. S. (2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7 No. 1 Februari 2020 E - ISSN : 2654-5837, Hal 78 - 84. 7(1), 78–84.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2024). *JOM Fekon*, 4(1), 1786–1800.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kusuma Putri, R., & Syafruddin, M. (2021). Pengaruh Kecocokan Kontinjen Antara Strategi Bisnis Dengan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Mawaddah, S. Z., & Darsono. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–11.
- Munawaro, M. A., & Ramdany, R. (2020). Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 109–121. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.70>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Noviyanti, E., & Setiawati, E. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance (Empirical Study on Service Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2017-2019). *The 13th University Research Colloquium 2021*,

21–30.

<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1291>

- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Purnamasari, M., & Yuniarwati, Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(1), 209–217. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i1.28662>
- Puspawati, D., Kurniawati, L., & Ulynnuha, O. I. (2023). *PENGANTAR EKONOMETRIKA DAN TERAPAN*.
- Puspitasari, D., Purwantini, A. H., & Maharani, B. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Borobudur Accounting Review*, 2(1), 23–37. <https://doi.org/10.31603/bacr.6999>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rozan, N., Arieftiara, D., & Hindria, R. (2023). Struktur Kepemilikan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.2088>
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra2, I. N. K. A., & Sudiartana3, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
- Sari, R. (2023). Pengaruh Sales Growth dengan Ketidakpastian Lingkungan dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Seviana, A. A., & Kristanto, A. B. (2020). Ketidakpastian Lingkungan dan Tendensi Agresivitas Pelaporan Keuangan versus Pajak: Efek Moderasi Kecakapan Manajerial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24130>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Alfabeta.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Yuniarti, N., Sherly, E. N., & Sari, D. N. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 97–109.
<https://doi.org/10.36085/jakta.v1i1.827>